

PENDEKATAN RESOLUSI KONFLIK DALAM UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK REGIONAL PADA ERA DIGITALISASI

Apandi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

email: apandi.ad@gmail.com

ABSTRACT

Several decades ago, internal conflicts in ASEAN countries became the world's spotlight. Even the impact is very alarming because it causes humanitarian crises, trauma due to armed conflict, violent extremism, and losses to government. Then came the time of international trade tension which had an impact on the economic growth of ASEAN countries. The purpose of this study is to reveal the role of the conflict resolution approach in efforts to prevent regional conflicts in the era of digitalization. Not without reason, the still lack of mutual trust and a less proactive attitude in addressing the situation of conflict between countries made the conflicting ASEAN countries decide to resolve bilaterally or resolve cases to external parties outside ASEAN. The era of digitalization is a hot issue in the trade war and can trigger tension between ASEAN countries. Of course this is not expected, therefore prevention efforts must be made. The literature study method was chosen to examine various findings that support this research to build a strategic model of the importance of the conflict resolution approach in the digitalization era. The results of the study stated that the government must show its credibility and put forward a proactive attitude, ethics in doing business, and building mutual trust and good cooperation between ASEAN countries. A conflict resolution approach can be an alternative to preventing regional conflicts by means of non-violence.

Keyword: *conflict resolution; regional.*

ABSTRAK

Beberapa dekade lalu, konflik internal di negara-negara ASEAN menjadi sorotan dunia. Bahkan dampaknya sangat memperhatikan karena menyebabkankrisis kemanusiaan, trauma akibat konflik bersenjata, ekstrimisme dengan kekerasan, dan kerugian bagi pemerintahan. Kemudian datang masa ketegangan perdagangan internasional yang berdampak pada turunya pertumbuhan ekonomi negara ASEAN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan peran pendekatan resolusi konflik dalam upaya mencegah terjadinya konflik regional pada era digitalisasi. Bukan tanpa alasan, masih rendahnya rasa saling percaya dan sikap kurang proaktif dalam menyikapi situasi konflik antar negara membuat negara ASEAN yang berkonflik memutuskan untuk menyelesaikan secara bilateral atau menyelesaikan kasus kepada pihak eksternal di luar ASEAN. Era digitalisasi menjadi isu hangat dalam perang dagang dan dapat memicu ketegangan antar negara ASEAN. Tentunya ini tidak diharapkan, oleh sebab itu upaya pencegahan harus dilakukan. Metode studi literatur dipilih untuk menelaah berbagai hasil temuan yang mendukung penelitian ini untuk membangun sebuah model strategis tentang pentingnya pendekatan resolusi konflik pada era digitalisasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemerintah harus menunjukkan kredibilitasnya dan mengedepankan sikap proaktif, beretika dalam berbisnis, dan membangun rasa saling percaya dan kerjasama yang baik antar negara ASEAN. Pendekatan resolusi konflik dapat menjadi alternatif mencegah konflik regional dengan sarana tanpa kekerasan.

Kata Kunci: *resolusi konflik; regional.*

PENDAHULUAN

Agenda penyelesaian konflik di negara-negara ASEAN adalah sebuah wacana lama yang masih membutuhkan pembahasan panjang. Serangkaian aktivitas untuk menyelesaikan persoalan konflik melalui jalan damai adalah salah satu prosedur yang kerap kali dilakukan (Kusumah et al., 2018). Saat ini, “Badan institusi milik ASEAN (*ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* (AIPR) sedang mencari resolusi konflik yang dapat dijadikan semacam pengaman untuk mencegah dan menyelesaikan konflik regional ASEAN. Cara ini merupakan tantangan dalam proses pembangunan komunitas antar-negara untuk meredam konflik dan mencegah terjadinya kembali konflik internal, sengketa hukum dan politik.” (Sefriani, 2014). Beberapa kasus konflik regional yang terjadi di kawasan ASEAN diantaranya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Konflik Regional Negara ASEAN

Negara yang berkonflik	Kasus	Langkah penyelesaian
Filipina dan Bangsa Moro (1980-an)	Konflik Moro yang ingin merdeka dan memisahkan diri dari Filipina	Membawa kasus ke Forum Menteri Luar Negeri Negara muslim
Kamboja dan Vietnam	Konflik perbatasan wilayah	Mediasi di Jakarta Informal Meeting (JIM)
Filipina dan Malaysia (1990)	Konflik di Mindanao Selatan	Mengundang Organisasi Konferensi Islam (OKI)
Beberapa Negara ASEAN dan Cina (1992)	Sengketa kepemilikan laut cina selatan	Pertemuan komite bersama
Indonesia dan Malaysia (1996)	Konflik perbatasan wilayah dua pulau di Sipadan dan Ligitan	Membawa kasus ke Mahkamah Internasional
Thailand dan Kamboja (2009-2011)	Konflik Perbatasan Negara	Meminta bantuan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB)
Myanmar dan etnis Rohingya (2017)	Konflik ketegangan di Rakhine State	

Sumber: liputan6.com, 2018; kompas.com, 2011

Dalam proses penyelesaian berbagai konflik regional ASEAN, masing-masing pihak bersengketa seringkali menginginkan agar negara-negara ASEAN berada dipihak negara bersengketa. Disinilah, peran pendekatan resolusi konflik membantu menyelenggarakan pemerintahan negara yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien (Arisaputra, 2013). Walaupun segala kemungkinan dapat saja terjadi, namun peran pendekatan resolusi konflik dalam menanggulangi konflik internal merupakan salah satu cara penyelesaian yang sering digunakan untuk jalan perdamaian. Adanya hubungan yang sangat dalam baik dari segi ekonomi, antar pemerintahan, hubungan teknokratis dan sosial walaupun secara langsung melemahkan otonomi daerah namun disisi lain menciptakan semacam perlindungan antar negara yang terlibat (Gerrits & Bader, 2016). Langkah ini diyakini dapat menciptakan iklim yang kondusif sehingga diharapkan akan berlanjut pada kerjasama regional.

Di era baru, digitalisasi ternyata mendatangkan banyak dampak yang patut diwaspadai. Bukan hanya manfaat yang diperoleh dari perkembangan teknologi melainkan juga pengaruh negatif yang dapat menimbulkan perselisihan antar-negara. Sejak lama, kemungkinan munculnya ketergantungan timbal balik yang dibangun antar-mitra dagang cukup untuk menciptakan konflik (Chatagnier & Kavaklı, 2017). Contoh kasus yang paling baru dan berpengaruh adalah persaingan perdagangan antara Amerika Serikat dan China.

Era digitalisasi nyatanya memunculkan sejumlah konflik baru yaitu konflik perdagangan digital (Setiawan, 2017). Berbeda dari konflik regional yang pernah terjadi antara negara ASEAN. Konflik ini muncul akibat pergerakan bisnis global. Persaingan perdagangan kedua negara tersebut berimbas pada mulai bergesernya bisnis global ke wilayah ASEAN seiring munculnya bisnis *e-commerce* dan *financial technology*. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi negara ASEAN ternyata masih belum mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital secara maksimal karena belum didukung oleh kerangka kerja peraturan global yang jelas.

Dampak dari terjadinya perang dagang membuat sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand mengalami pertumbuhan perekonomian yang cukup rendah dibandingkan dengan di luar ASEAN. Singapura melakukan efisiensi dengan kisaran prediksi pertumbuhan ekonomi negara menjadi 0,0 hingga 1,0% dari proyeksi 1,5 hingga 2,5%. Sedangkan Malaysia memperkirakan pertumbuhan ekonomi negaranya berjalan stabil tanpa menunjukkan gejala signifikan yang berarti yaitu hanya pada posisi 4,5% dari Produk Domestik Bruto pada semester kedua 2019. Kemudian disusul oleh Thailand, dimana nilai ekspor selama lima bulan pertama 2019 menunjukkan penurunan sebesar 2,7%, dan yang terakhir adalah Indonesia dimana terjadi penurunan nilai ekspor pada periode Januari-Juni 2019 yang mencapai 80,32 miliar atau menurun sebesar 8,57% dari tahun sebelumnya (Liputan6.com, 2019). Jelasnya, ditengah persaingan ekonomi jangan sampai memicu konflik antar-negara ASEAN. Intinya, untuk mencegah kesenjangan dan ketegangan digital dibutuhkan aturan perdagangan digital yang benar-benar adil.

Saat ini, negara-negara di dunia melakukan penguatan strategi dan kontrol terhadap kebijakan ekonomi ditengah tekanan globalisasi. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga berupaya membatasi kapasitas negara untuk menghindari manipulasi kebijakan perdagangan agar menghindari kemungkinan muncul konflik (Davis et al., 2019). Sebagai pertimbangan, pendekatan resolusi konflik dapat menjadi alternatif mencegah konflik regional melihat dampak negatif perang dagang yang cukup besar.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendekatan resolusi konflik merupakan penggunaan cara-cara yang demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi disuatu wilayah atau antara pihak yang bersengketa (Wallenstein, 2018). Dengan pendekatan ini, maka pihak yang bersengketa atau berkonflik dapat memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan melibatkan pihak ketiga sebagai juru damai. Pihak ketiga yang dilibatkan merupakan pihak yang netral, bijaksana, dan adil yang mengambil tanggungjawab mengatur dalam membuat keputusan. Dalam proses pemecahan masalah, yang jelas pendekatan resolusi konflik internasional bertujuan menyelesaikan konflik melalui perdamaian dengan mengedepankan keterlibatan dan dialog kebijakan antara negara. Ini adalah salah satu rangkaian yang merujuk dalam perubahan tata dunia (Paulsson, 2018) (Thakur, 2019).

Proses resolusi konflik akan melalui serangkaian tahapan yaitu, "Pertama, tahap negosiasi sebagai bentuk interaksi sosial antar-pihak yang berkonflik dalam berusaha mencari jalan damai tanpa adanya kekerasan (Sujarwanto, 2012). Dalam proses negosiasi, terjadi tawar-menawar untuk menghasilkan suatu keputusan yang menjadi dasar pembentukan sebuah peraturan baru antaradua belah pihak tersebut. Kedua, proses mediasi dalam upaya menyelesaikan konflik melalui jalan perundingan, kesepakatan yang dilakukan dengan bermusyawarah. Ini diselenggarakan atas keinginan kedua belah pihak yang tanpa adanya keterpaksaan. Terakhir, mengambil keputusan berdasarkan konsensus yang bersifat kolektif. Untuk menghindari perdebatan, maka persoalan yang dirundingkan

harus mempunyai landasan yang sangat kokoh sehingga dapat diterima seluruh pihak (Haboddin, 2019).

Apabila menggunakan pendekatan resolusi konflik, maka kemampuan menyelesaikan masalah dibutuhkan. Aspek terpenting adalah resolusi konflik harus mempertimbangkan masa depan, misalnya bagaimana upaya masalah pengungsian harus ditangani (Scheindlin, 2017). Kemampuan tersebut terdiri atas beberapa macam yaitu, 1) kemampuan orientasi yang meliputi pemahaman tentang konflik dan sikap yang menunjukkan anti kekerasan, sikap jujur, adil, memiliki toleransi, dan harga diri yang tinggi; 2) kemampuan persepsi untuk dapat memahami dan melihat situasi yang terjadi; 3) kemampuan emosi meliputi kemampuan dalam mengendalikan emosi; 4) kemampuan komunikasi yaitu dapat mendengarkan orang lain secara profesional; 5) kemampuan berfikir kreatif dalam memecahkan masalah; dan yang terakhir 6) kemampuan berfikir kritis dalam mempresiksi dan menganalisis situasi konflik yang sedang terjadi.

Untuk melakukan pendekatan resolusi konflik, maka pihak ketiga inilah yang harus mempunyai kemampuan yang dibutuhkan sebagai juru damai. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pihak ketiga harus mampu menjadi pendengar aktif, memiliki kemampuan untuk menangani eskalasi, mampu membaca situasi dan kondisi yang terjadi, memahami sudut pandang dan perspektif pihak yang berkonflik, mengetahui jalan memecahkan permasalahan yang terjadi dengan netral dan adil dan mempunyai kemampuan negosiasi dan mediasi yang handal.

METODE

Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur. Fokus penelitian terhadap aktivitas persaingan ekonomi di era digitalisasi khususnya dampaknya terhadap negara ASEAN. Sejauh ini, pengungkapan tujuan penelitian terbatas pada strategi mencegah terjadinya konflik regional menggunakan pendekatan resolusi konflik. Sebagian besar literatur yang relevan baik secara empiris maupun teoritis digunakan untuk mendukung hasil temuan. Diketahui bahwa, tinjauan literatur mengenai catatan sejarah konflik regional di negara ASEAN perlu untuk dipaparkan secara singkat, dan secara khusus, penelitian ini dapat memberikan hasil kesimpulan yang orisinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi empiris terbaru mengungkapkan hasil yang beragam tentang efek perdagangan internasional dan kemungkinan terjadinya konflik. Kemungkinan yang paling besar adalah karena adanya faktor ekonomi, pertimbangan politik termasuk kemampuan kekuasaan pemerintah dan tingkat demokrasi. Chiu (2019) menemukan bahwa dukungan kuat untuk proposisi liberal pada sistem politik yang berorientasi pada perdagangan dan demokratisasi lebih memungkinkan untuk mengurangi dan mencegah konflik terutama di bidang ekonomi yang sedang berkembang. Lebih lanjut, Das (2019) menjelaskan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kelayakan penyelesaian konflik dapat dilakukan apabila biaya dan strategi dapat teridentifikasi sebelum ataupun sesudah konflik tersebut terjadi.

Belajar dari kasus perang dagang di era digitalisasi, dan beberapa konflik yang pernah terjadi antara negara ASEAN. Mencegah konflik sejak dini tentunya akan lebih baik dilakukan daripada menyelesaikan setelah terjadi, karena bagaimanapun mencari jalan tengah antara kedua belah pihak yang berselisih tidaklah mudah. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mencegah adalah prioritas. Akan tetapi apabila telah terjadi perselisihan antar-negara ASEAN maka beberapa penawaran mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan resolusi konflik.

Serangkaian pendekatan resolusi konflik sebagaimana dikemukakan oleh Boistein (2018) menetapkan beberapa strategi yang digunakan untuk mencegah terjadinya konflik antar negara diantaranya; 1) menetapkan mekanisme sub-regional reguler untuk kerjasama. Adanya konferensi internasional sebagai sarana dialog kebijakan yang membahas pertukaran bilateral tentang isu-isu hangat dan dapat memfasilitasi kerjasama resolusi konflik. Mekanisme ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kerjasama antara kementerian dan parlemen pemerintahan; 2) membentuk lembaga dan/atau konferensi regional tahunan, meningkatkan stabilitas regional serta memperkuat partisipasi dan inisiatif regional yang sudah ada; 3) meningkatkan forum dialog untuk memecahkan tantangan bersama; 4) apabila memungkinkan untuk melakukan identifikasi dan usulan insentif untuk upaya penyelesaian konflik. Pihak ketiga dapat menawarkan dukungan untuk kebijakan tertentu, mengidentifikasi cara untuk meningkatkan leverage kerjasama dibidang ekonomi; dan 5) memfasilitasi kerja sama masyarakat sipil. Dengan adanya fasilitas yang memadai, para ahli dapat saling bertukar pikiran dan ide serta mengembangkan rekomendasi melalui inovasi. Negara harus mempromosikan ikatan masyarakat sipil seperti pertukaran pelajar atau ahli dibidang ekonomi.

Fokus utama mencegah konflik regional di era digital adalah dengan mendukung industri lokal. Memberikan akses dan modal serta berbagai bentuk dukungan dari pemerintah. Terlebih, mungkin perlu untuk membuat kebijakan yang melindungi perusahaan lokal. Tanpa kebijakan yang tepat, maka persaingan dengan perusahaan asing dapat memicu konflik. Terlebih lagi, peraturan perdagangan yang bersifat global yang tidak tepat dapat melemahkan perekonomian negara yang sedang berkembang karena kalah bersaing dengan negara maju.

Langkah kedua adalah dengan membangun serangkaian kerjasama aktif antara negara ASEAN. Ini semacam ikatan kerjasama ekonomi khususnya perdagangan bilateral dan membangun keanggotaan kelembagaan bersama dalam sistem ekonomi digital. Dengan adanya hubungan timbal balik dan hubungan diplomatik yang sangat dalam mampu membuat sejumlah negara yang kuat akan memberikan perlindungan dan mau untuk terlibat secara renposif karena hubungan tersebut. Strategi tersebut akan menumbuhkan rasa perdamaian dan meminimalisasi persaingan tidak sehat dan konflik militer antara negara demi kebaikan ekonomi bersama (Chatagnier & Kavaklı, 2017). Ditengah ketidakpastian maka kearifan lokal dan kepemimpinan yang kolektif diharapkan dapat mengarahkan pada situasi yang lebih baik di masa mendatang.

Mendukung hadirnya inovasi teknologi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dibutuhkan. Pemerintahan juga membutuhkan aparatur sipil negara yang mampumenggunakan teknologi digital serta memahami pendekatan resolusi konflik, dan penguatan kontrol negara terhadap kebijakan ekonomi dan politisasi perdagangan. Apabila masing-masing negara memahami peran penting dari pendekatan resolusi konflik dan kemampuan yang dimilikinya sebagai bentuk pemecahan masalah secara bersama, tentu konflik di era digital dapat dihindari.

Inovasi baru dapat mendukung industri lokal untuk mampu bersaing. Sedangkan sumber daya manusia yang kompeten akan meminimalisasiperselisihan regional antar-negara ASEAN karena memahami masyarakat akan lebih mengetahui tentang arti penting perdamaian dan etika bisnis yang baik. Melalui serangkaian edukasi dan pelatihan bisnis, bukan hanya memungkinkan masyarakat menjadi lebih produktif tetapi juga menjadikan individu mampu mengendalikan diri dan memiliki kesadaran tentang pentingnya distribusi kekayaan untuk menciptakan kesejahteraan.

Mengadakan pendidikan resolusi konflik untuk kalangan generasi milenial juga tidak kalah penting. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dudley, Johnson, & Jonshon (1996)

yaitu, “Konflik merupakan sifat dasar yang alami dari manusia sehingga dapat menjadi kekuatan yang konstruktif apabila didekatkan dengan keterampilan; 2) proses pemecahan masalah dapat meningkatkan iklim yang baik; 3) adanya strategi konflik dapat mengurangi kekerasan, praktik bullying, dan skorsing; 4) kehadiran pelatihan resolusi konflik dapat membantu untuk memperdalam pemahaman tentang jati diri; 5) serangkaian pelatihan dapat mendorong kegiatan yang bermanfaat; 6) mengajarkan pelajar tentang arti perdamaian, disiplin, meningkatkan keterampilan, berfikir kritis, dan mampu menghindari segala bentuk kekerasan; 7) menciptakan sistem manajemen perilaku yang lebih efektif untuk mengatasi konflik.”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat dijelaskan bahwa pendekatan resolusi konflik yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik di era digitalisasi dilakukan melalui empat strategi. Pertama, dengan mendukung industri lokal, memperkuat kontrol kebijakan ekonomi, dan memberikan perlindungan terhadap perusahaan asing dan hak kekayaan intelektual. Kedua, membangun kerjasama dan menyelenggarakan konferensi tahunan untuk membahas tantangan dan hambatan ekonomi bersama. Ketiga, adalah mendukung hadirnya inovasi teknologi digital dan peningkatan kompetensi aparatur negara dalam bidang teknologi digital. Kemudian yang terakhir adalah mengadakan pendidikan resolusi konflik untuk generasi milenial.

Penelitian novel ini terletak pada, memanfaatkan pendekatan resolusi konflik dalam upaya untuk mengurangi terjadinya konflik regional antara negara-negara ASEAN di era digitalisasi data dan informasi. Hasil penelitian ini juga memberikan manfaat yang sangat signifikan untuk pengembangan teori mitigasi konflik regional, dan berkontribusi pada pembuatan kebijakan skala regional, menuju perdamaian dan kerja sama bilateral yang saling menguntungkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188–216. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>
- Chatagnier, J. T., & Kavakli, K. C. (2017). From Economic Competition to Military Combat: Export Similarity and International Conflict. *Journal of Conflict Resolution*, 61(7), 1510–1536. <https://doi.org/10.1177/0022002715613565>
- Davis, C. L., Fuchs, A., & Johnson, K. (2019). State Control and the Effects of Foreign Relations on Bilateral Trade. *Journal of Conflict Resolution*, 63(2), 405–438. <https://doi.org/10.1177/0022002717739087>
- Gerrits, A. W. M., & Bader, M. (2016). Russian patronage over Abkhazia and South Ossetia: implications for conflict resolution. *East European Politics*, 32(3), 297–313. <https://doi.org/10.1080/21599165.2016.1166104>
- Haboddin, M. (2019). Populisme, Politik Pertahanan, Dan Pemimpin Lokal. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 173–180. <https://doi.org/10.33474/jisop.v1i2.4802>
- Kusumah, R. W. P. I., Supriatna, N., & Kusmarni, Y. (2018). Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan Asean Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan. *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 7(2), 255–268. <https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15610>
- Liputan6.com. (2019). *Selain Indonesia, Ekonomi 3 Negara ASEAN Lesu Akibat Perang Dagang*. <https://www.liputan6.com/global/read/4040417/selain-indonesia-ekonomi-3-negara-asean-lesu-akibat-perang-dagang>

- Paulsson, M. R. P. (2018). Conflict resolution in a changing world order. *Trade, Law and Development*, 10(1).
<http://www.tradelawdevelopment.com/index.php/tld/article/view/10%281%29TL%26D1%282018%29/0>
- Scheidlin, D. (2017). *Lessons for Israel and Palestine from Conflict Comparisons* (Issue July).
- Sefriani. (2014). Asean Way Dalam Perpektif Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1), 89–96. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10128>
- Setiawan, W. (2017). Era Digital dan Tantangannya. *Seminar Nasional Pendidikan 2017*, 1–9. <https://core.ac.uk/download/pdf/87779963.pdf>
- Sujarwanto, I. (2012). Interaksi Sosial Antar Umat Beragama (Studi Kasus Pada Masyarakat Karangmalang Kedungbanteng Kabupaten Tegal). *Journal of Educational Social Studies*, 1(2). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess/article/view/731>
- Thakur, R. (2019). *International Conflict Resolution* (1st ed.). Routledge.
- Wallensteen, P. (2018). *Understanding Conflict Resolution*. SAGE Publications Limited.